J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Simbol Otoriter Rezim Orde Baru Pada Film Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas: Analisis Semiotika Roland Barthes

Fadly Akbar Briliansyah[1], Catur Suratnoaji[2]
Fakultas Ilmu Sosial, Budaya Dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia
E-mail: 18043010224@student.upnjatim.ac.id[1], catur_sa@yahoo.com[2]

Article History:
Received: 14 Maret 2025
Revised: 10 April 2025
Accepted: 13 April 2025

Keywords: *film, semiotika, Orde Baru, otoritarianisme, analisis kualitatif.*

Abstract: *Film sebagai media massa berfungsi sebagai saluran gagasan dan refleksi realitas sosial-politik, termasuk isu-isu sensitif seperti periode Orde Baru yang penuh kontroversi. "Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas" karya Edwin menjadi salah satu film yang berhasil mengeksplorasi isu tersebut. Dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes, penelitian ini mengungkap representasi pemerintah otoriter Orde Baru melalui tanda-tanda denotatif, konotatif, dan mitos. Pendekatan kualitatif dan paradigma interpretif digunakan untuk menganalisis elemen-elemen ideologi negara dominan, diskriminasi gender, pola kekuasaan terpusat ke eksekutif, penggunaan preman oleh negara, masuknya pemerintah ke ruang privat, kekerasan militer, pembatasan pers, serta bahasa sebagai alat kontrol sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa film ini secara efektif merepresentasikan berbagai aspek rezim otoriter Orde Baru secara simbolik melalui narasi visual dan suara.*

PENDAHULUAN

Film adalah media massa yang menyampaikan gagasan, konsep, hiburan, dan edukasi melalui elemen seperti cerita, gambar, dan suara (Nur, 2023). Swingwood (1972) menyebut film sebagai refleksi kenyataan yang merekam manifestasi individu, sosial, budaya, politik, hingga pemerintahan (Utami, 2017). Film juga dapat menjadi alat doktrinasi, sebagaimana dipaparkan oleh Alkhajar et al. (2013) bahwa film merekam dan merekonstruksi realitas melalui perspektif pembuatnya.

Film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Edwin mengangkat tema kritis tentang kekerasan dan otoritarianisme di era Orde Baru, berlatar tahun 1980-an di tengah kontrol sosial ketat yang sering berujung pelanggaran HAM (Honna, 2019). Film ini memenangkan Golden Leopard di Locarno International Film Festival 2021 sebagai film Indonesia pertama yang meraih penghargaan utama dalam lima tahun terakhir (Dewabrata, 2021). Di Indonesia, film ini menyabet lima penghargaan Piala Citra 2022, termasuk Sutradara Terbaik dan Pemeran Utama Terbaik (Ginanjar, 2022), serta lima kemenangan di Piala Maya 2022 (Santosa, 2022). Penghargaan tersebut menunjukkan kualitas teknis, artistik, dan kekuatan narasi film dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat.

Film ini merepresentasikan realitas sosial dan politik melalui narasi dan karakter Ajo Kawir serta Iteung, menggambarkan kompleksitas rezim Orde Baru. Peneliti menilai pentingnya film ini sebagai refleksi soal warisan struktural Orde Baru yang masih relevan dalam dinamika politik, hukum, dan sosial Indonesia saat ini. Selain sebagai hiburan, film ini menjadi cermin yang memperlihatkan dampak otoritarianisme dengan menyoroti isu-isu krusial yang mungkin terlewat jika hanya melalui tontonan biasa. Perspektif pembuatnya berkontribusi dalam merekam dan merekonstruksi realitas sosial untuk tujuan komunikasi, edukasi, atau bahkan propaganda. Peran film sebagai alat budaya membutuhkan apresiasi kritis, memahami konteks dan pesan di balik karyanya, tanpa mengabaikan nilainya dalam seni dan komunikasi (Alkhajar et al., 2013).

LANDASAN TEORI

Pemerintah Orde Baru

Sejarah Pemerintah Orde Baru dimulai dari peristiwa Gerakan 30 September 1965, yang melibatkan konflik antara PKI dan militer. PKI dituduh mengkhianati Pancasila dan bertanggung jawab atas pembunuhan tujuh perwira tinggi TNI, sehingga mengalami pembantaian dan diskriminasi besar-besaran oleh militer. Suharto mengambil alih kekuasaan melalui Supersemar, menjadi Presiden sementara oleh MPR, sementara Sukarno menjadi tahanan rumah hingga wafat (Legge et al., 2024).

Kondisi Masyarakat Saat Rezim Orde Baru

Presiden Suharto mengakhiri konflik Malaysia, membawa Indonesia kembali ke PBB, dan menjadi pendiri ASEAN pada 1967, menciptakan stabilitas politik dengan dukungan militer, serta menjalankan kebijakan ekonomi yang menyederhanakan regulasi dan memperkenalkan undang-undang investasi asing (Legge et al., 2024). Lembaga legislatif dan yudikatif melemah, menjadi pelengkap tanpa peran berarti. Undang-undang investasi asing menurunkan inflasi, menstabilkan rupiah, meningkatkan produksi, dan mendorong eksplorasi minyak dengan perusahaan asing, tetapi krisis minyak 1980-an memaksa Suharto mengutamakan sektor swasta dan manufaktur, meski kebijakan ini dikritik karena meningkatkan ketergantungan pada modal asing dan memperbesar kesenjangan sosial (Legge et al., 2024).

Suharto membangun infrastruktur di luar Jawa seperti Sumatra, Kalimantan, dan Aceh, namun Nusa Tenggara dan Timor Timur tetap tertinggal (Legge et al., 2024). Golkar menjadi partai dominan setelah penyederhanaan partai politik pada 1973. Kekuasaan eksekutif sangat dominan, mengatur legislatif dan yudikatif yang kehilangan independensi. DPR hanya menyetujui aturan pemerintah, sementara Mahkamah Agung tak mampu menjalankan fungsi check and balances secara objektif (Budiardjo, 2008).

Diskriminasi dan kekerasan meningkat selama Orde Baru, dengan militer mengorganisasi preman untuk mengelola konflik melalui relasi sosial dengan warga, termasuk lewat Siskamling. Preman menjadi figur otoritatif yang memperluas kontrol negara hingga desa-desa (Wilson, 2018). Operasi Petrus digunakan untuk membunuh preman yang dianggap mengancam kekuasaan negara, menciptakan teror sosial (Wilson, 2018). Krisis ekonomi Asia 1990-an melemahkan kepercayaan rakyat, memicu kerusuhan, dan menyebabkan Suharto mengundurkan diri pada Mei 1998, mengakhiri Orde Baru setelah 32 tahun berkuasa (Legge et al., 2024).

Otoritarianisme

Otoritarianisme adalah paham politik yang mengutamakan kekuasaan, kewibawaan, dan pengaruh, di mana seseorang atau kelompok memiliki kontrol besar atas orang lain

(Mangunhardjana, 2007). Berasal dari kata authority yang berarti kuasa atau wibawa, otoritarianisme memengaruhi pendapat, pikiran, dan tindakan individu atau kelompok. Orang dengan pandangan otoritarian menjadikan kekuasaan sebagai pedoman hidup dan dasar keputusan. Mereka cenderung menilai masalah berdasarkan posisi atau otoritas seseorang dalam organisasi, bukan dari kepentingan atau hakikat masalah itu sendiri (Mangunhardjana, 2007).

Sistem pemerintahan otoriter menentang prinsip demokrasi dengan kekuasaan mutlak di tangan pemimpin atau kelompok kecil tanpa memberi ruang bagi rakyat untuk berpendapat atau berpartisipasi (Utami, 2017). Pemimpin memegang kendali penuh atas negara, mengabaikan keinginan rakyat, dan membatasi kebebasan berbicara. Dalam sistem ini, hanya suara pemimpin yang dianggap penting, sementara mekanisme *check and balances* tidak ada. Berbeda dengan demokrasi yang menghargai hak suara rakyat dan melibatkan banyak orang dalam pengambilan keputusan, sistem otoriter memusatkan kekuasaan pada satu tangan tanpa kontrol dari pihak lain untuk mencegah atau mengoreksi kesalahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode riset kualitatif untuk memahami dan menafsirkan realitas berdasarkan paradigma konstruktivis atau interpretif. Metode ini mengeksplorasi bagaimana makna tercipta dalam interaksi komunikasi secara alami dan autentik (Kriyantono, 2006). Fokusnya adalah pada pemahaman mendalam tentang bagaimana makna dibangun, direkonstruksi, serta simbol-simbol diciptakan dan diterima masyarakat (Kriyantono, 2006). Pengumpulan data berfokus pada eksplorasi makna dari perspektif individu, mencakup motif serta konteks sosial, budaya, psikologis, dan ekonomi. Data dianalisis dengan menyandingkan berbagai makna untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih umum (Kriyantono, 2006).

Pendekatan "berpikir secara kualitatif" berfokus pada prosedur riset kualitatif yang bertumpu pada asumsi interpretif (James Anderson, 2009; Daymon & Hollaway, 2011; Bungin, 2020). Desain penelitian kualitatif sangat bergantung pada peneliti sebagai instrumen utama untuk memahami fenomena dinamis yang sulit diamati (Bungin, 2020). Peneliti sering kali belum sepenuhnya memahami objek penelitian di awal, sehingga membutuhkan waktu dan kesabaran untuk mengidentifikasi fenomena yang relevan. Masalah dalam penelitian kualitatif bersifat kasuistik dan unik, sehingga desain penelitian tidak dapat diterapkan secara umum pada semua kasus. Penelitian ini menekankan eksplorasi mendalam untuk memahami makna dalam konteks alami dan menghasilkan temuan yang relevan (Bungin, 2020).

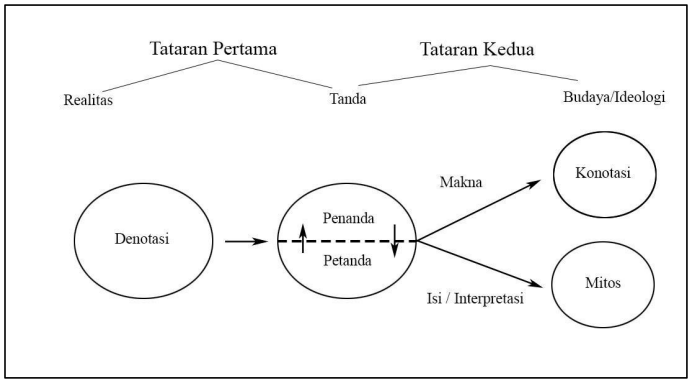
Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan data secara terstruktur, faktual, dan akurat, serta memahami makna di balik data tersebut (Kriyantono, 2006). Penelitian ini menggali alasan suatu peristiwa terjadi, motif tindakan individu, dan faktor-faktor yang memengaruhi fenomena tersebut. Selain menjawab pertanyaan "apa", pendekatan ini juga menjelaskan "mengapa", sehingga disebut deskriptif verifikasi. Bersifat induktif, penelitian ini berangkat dari data menuju teori yang fleksibel sesuai temuan lapangan. Teori awal digunakan sebagai pedoman dan bisa berubah jika temuan lebih relevan. Pendekatan ini memberikan kebebasan dalam merancang riset sebelum, selama, atau setelah pengumpulan data berlangsung (Kriyantono, 2006).

Penelitian ini menggunakan teori semiotika Roland Barthes untuk menganalisis tanda-tanda dalam teks atau fenomena budaya, dengan fokus pada denotasi (makna literal), konotasi (makna sosial/kultural), dan mitos (lapisan ideologis yang membentuk cara pandang masyarakat). Mitos berfungsi untuk mempertahankan struktur sosial dan budaya tertentu dengan membuat kenyataan tampak alami, meskipun sebenarnya adalah konstruksi sosial (Barthes, 1977; Sobur,

2018). Barthes juga menekankan peran pembaca dalam memahami tanda, di mana konotasi melibatkan elemen tanda denotatif sebagai dasar keberadaannya. Teori ini memperluas semiotika Saussure dengan menghubungkan tanda pada level denotatif ke konotatif dan ideologi melalui mitos, yang menyederhanakan dunia untuk mendukung ideologi dominan dalam masyarakat (Sobur, 2018).

Denotasi dan konotasi memiliki perbedaan jelas, di mana denotasi adalah makna literal atau sistem penandaan tingkat pertama, sedangkan konotasi berada pada tingkat kedua dan terkait dengan operasi ideologi (Sobur, 2018). Barthes menolak ketertutupan makna denotasi yang dianggap alami dan tidak bisa dipertanyakan, mengoreksi pandangan bahwa makna harfiah bersifat netral (Budiman, 1999; Sobur, 2018). Konotasi berfungsi mengungkapkan dan membenarkan nilai-nilai dominan dalam suatu periode. Mitos, sebagai sistem pemaknaan tingkat kedua, dibangun atas rantai pemaknaan sebelumnya. Contohnya, imperialisme Inggris digambarkan melalui penanda seperti teh, yang menjadi simbol budaya meski tidak ditanam di Inggris (Sobur, 2018).

Barthes mengaitkan ideologi dengan mitos karena keduanya melibatkan hubungan termotif antara penanda dan petanda konotatif (Budiman, 2001; Sobur, 2018). Ideologi, seperti mitos, berfungsi sebagai kesadaran palsu yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap dunia. Mitos bekerja dengan menyederhanakan dunia melalui tanda-tanda yang tampak alami, meski sebenarnya adalah konstruksi sosial. Mitos juga berperan dalam membentuk dan memperkuat ideologi dominan melalui teks, simbol budaya, atau kode seperti tokoh dan latar. Barthes melihat konotasi sebagai ekspresi budaya yang mengungkap nilai-nilai dominan dalam suatu periode tertentu (Sobur, 2018).



Gambar 1. Alur Semiotika Roland Barthes

HASIL DAN PEMBAHASAN

Film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas mengisahkan Ajo Kawir (Marthino Lio), petarung jalanan yang menyembunyikan impotensinya, dan Iteung (Ladya Cheryl), perempuan petarung dengan rahasia besar. Pertemuan mereka dalam duel berujung pada cinta dan perjuangan mencari kebahagiaan meski menghadapi cibiran masyarakat. Berlatar akhir 1980-an hingga awal 1990-an, film ini menghadirkan nuansa era tersebut melalui dialog baku, gaya busana khas, dan peristiwa penting seperti kasus Petrus serta gerhana matahari 1983. Penggunaan kamera analog 16 mm memperkuat atmosfer retro, menciptakan kesan autentik yang membawa penonton ke masa lalu.

Film Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas memiliki 87 adegan/scene. Peneliti menelusuri adegan yang mewakili tanda-tanda yang relevan dengan fokus atau tujuan penelitian, yakni Representasi Pemerintah Otoriter Orde Baru.

1. Adegan 3 (Menit 04:28 – 05:29)



Gambar 2. Orang-Orang Membicarakan Janda Dan Pak Lebe



Gambar 3. Ajo Dikeroyok Di Tempat Bilyar

Denotasi	Konotasi	Mitos
Di sebuah warung, orang-orang sedang bermain bilyar dan membicarakan Janda dan Pak Lebe. Ajo pemuda nekat dan gemar berantem dikeroyok di tempat bilyar diiringi lagu Kerukunan Pancasila dari Mara Karma	Janda atau perempuan pada masa orde baru ditempatkan pada posisi setelah laki-laki atau warga negara nomor dua. Saat Ajo dikeroyok, ada kontradiksi dari lirik lagu dan kenyataan yang ada.	Tugas perempuan pada masa Orde Baru, perempuan harus melayani suami, anak-anak dan keluarga, masyarakat dan negara. Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai doktrin yang komprehensif, menggunakan Pancasila sebagai hegemoni dan dominasi.

Tabel 1. Analisis 3 Tanda Barthes Pada Adegan Ketiga

Adegan 3 menggambarkan ruang publik, seperti bilyar, sebagai tempat refleksi sosial sesuai teori public sphere Habermas yang menekankan interaksi gagasan sosial, politik, dan ekonomi (Tricana, 2013). Ideologi Orde Baru, seperti Ibuisme Negara, membatasi perempuan pada peran domestik tanpa pamrih, menciptakan relasi kuasa timpang dan marginalisasi gerakan perempuan (Rahyu & Kencana, 2019; Roida, 2018). Klientelisme ekonomi Orde Baru ditampilkan melalui distribusi kekayaan kepada elit, seperti Pak Lebe, untuk menjaga hegemoni politik (Farchan, 2022). Klientelisme ini menunjukkan kekuasaan material yang terkonsentrasi. Adegan pembicaraan tentang Pak Lebe yang menjebak suami orang dengan utang hingga menuntut pembayaran melalui hubungan seksual dengan istrinya mengilustrasikan lemahnya peran perempuan dan rentannya masyarakat kecil di era Orde Baru.

Penggunaan doktrin Pancasila sebagai alat kontrol politik terlihat melalui indoktrinasi dan tindakan represif. Lagu "Kerukunan Panca Sila" menunjukkan kontradiksi antara ajaran Pancasila dan realitas kekuasaan Orde Baru (Wahyudi, 2015). Perfeksionisme negara ala Orde Baru menciptakan kontrol sistematis melalui doktrin Pancasila yang diselundupkan ke politik praktis (Magnis Suseno dalam Wahyudi, 2015). Kekerasan bertentangan dengan sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," yang menekankan penghormatan terhadap harkat manusia. Adegan pengroyokan di tempat bilyar dengan iringan lagu "Kerukunan Panca Sila" mempertegas kontradiksi antara doktrin Pancasila dan tindakan represif rezim.

2. Adegan 5 (Menit 06:25 − 06:58)



Gambar 4. Ajo Sedang Mencari Pak Lebe Di Tambang



Gambar 5. Ajo Sedang Meremehkan Perempuan

Denotasi	**Konotasi**	**Mitos**
Ajo mencari Pak Lebe bersiap melakukan kekerasan dengan membawa pisau lipat. Dalam pencarian, bertemu dengan Iteung, pengawal pribadi Pak Lebe. Dan terjadi percakapan antar mereka berdua.	Ajo ingin menghabisi Pak Lebe karena di tempat bilyar mendengar soal Pak Lebe yang semena-mena, Ajo ingin menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri. Namun Ajo bertemu iteung, seorang perempuan yang berbeda dari tatanan perempuan pada saat itu yang diremehkan.	Di zaman Orde Baru, tokoh masyarakat atau elit politik yang berafiliasi dengan pemerintah, kebanyakan akan tidak tersentuh hukum. Hukum biasanya hanya berlaku pada masyarakat miskin dan kelas rendah. Perempuan juga direndahkan bahwa perempuan tidak mungkin melakukan aktivitas yang dilakukan oleh laki-laki seperti pandai berantem sehingga menjadi pengawal orang penting, yang pada saat itu tugas ini diemban oleh laki-laki.

Tabel 2. Analisis 3 Tanda Barthes Pada Adegan Kelima

Suharto secara terencana mengurangi kekuatan lembaga seperti MPR, DPR, dan pengadilan, menjadikannya hampir tanpa suara, dengan kekuatan eksekutif yang sangat dominan hingga mengatur legislatif dan yudikatif (Budiardjo, 2008). Mahkamah Agung juga dikuasai eksekutif, menciptakan keadaan "*executive-heavy*" di mana hukum hanya berlaku sesuai keinginan Presiden (Budiardjo, 2008). Orang seperti Ajo Kawir, yang geregetan dengan ketidakadilan, menegakkan keadilan dengan caranya sendiri meski harus melawan Pak Lebe lewat berantem, dibantu keberanian tanpa takut mati. Saat berurusan dengan Iteung, Ajo menunjukkan pola pikir bahwa perempuan tidak semestinya terlibat dalam urusan kekerasan. Pandangan ini dipengaruhi konsep state ibuism Orde Baru yang mendefinisikan perempuan sebagai objek pasif berperan sebagai ibu/istri, sedangkan laki-laki memiliki posisi strategis dalam keputusan publik (Dewi, 2007).

Konsep gender membagi peran laki-laki dan perempuan berdasarkan norma sosial. Perempuan dianggap lemah, hanya sebagai pelengkap, terbatas pada tugas domestik seperti memasak, merawat rumah tangga, dan anak, sehingga kontribusi mereka di luar domestik tidak dianggap penting (Aniqurrohmah, 2023). Gender juga ditentukan oleh faktor sosial budaya setempat, menciptakan perbedaan perilaku, kebiasaan, aturan, dan pandangan hidup antara laki-laki dan perempuan (Aniqurrohmah, 2023). Ajo awalnya memandang perempuan seperti Iteung

dalam posisi sekunder dengan pekerjaan yang dianggap lemah. Sedangkan laki-laki dianggap unggul melalui fisik, daya tahan, keberanian, dan menghadapi risiko sebagai bentuk pembuktian maskulinitas, sementara perempuan sebaliknya.

3. Adegan 7 (Menit 10:29 – 11:17)



Gambar 6. Ajo Bertemu Pak Lebe



Gambar 7. Ajo Mengiris Telinga Pak Lebe

Denotasi	**Konotasi**	**Mitos**
Ajo menemui Pak Lebe saat Pak Lebe berjalan turun dengan mobil *off road* tambang. Sapaan pertama arogan dari Pak Lebe ke Ajo. Tak lama setelah itu, telinga Pak Lebe dipotong oleh Ajo.	Ajo menganggap satu-satunya cara untuk memberi pelajaran ke Pak Lebe adalah dengan tangannya sendiri. Mobil SUV 4x4 off road yang dipakai Pak Lebe adalah penanda orang kaya. Juga helm kuning yang dipakai menandakan dia mandor.	Tindakan vigilantisme oleh Ajo terhadap status quo (Pak Lebe).

Tabel 3. Analisis 3 Tanda Barthes Pada Adegan Ketujuh

Tindakan Ajo memotong telinga Pak Lebe disebut vigilantisme, yakni aksi individu/kelompok di luar hukum formal untuk menegakkan keadilan secara sepihak, sering kali melibatkan balas dendam (Soumokil, 2013). Fenomena ini muncul saat masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem hukum formal yang dirasa gagal memberikan keadilan, seperti dalam kasus seorang orang tua melindungi anaknya sebagai korban kejahatan (Soumokil, 2013).

Perspektif Gerakan Hukum Kritis (*Critical Law Studies*) menunjukkan bahwa tindakan Ajo mencerminkan kegagalan hukum dalam menyelesaikan masalah. Gerakan ini menantang klaim kebenaran, mengungkap dominasi, dan merekonstruksi doktrin hukum agar lebih adil (Wicaksono, 2024). Mahfud MD menjelaskan bahwa hukum dipengaruhi oleh politik; rezim otoriter menghasilkan hukum represif, sementara rezim demokratis menghasilkan hukum responsif (Wicaksono, 2024).

Dalam konteks Orde Baru yang otoriter, hukum cenderung tidak menyentuh orang kaya atau berkuasa yang dekat dengan rezim. Ketimpangan distribusi kekuasaan dan ekonomi menjadi akar konflik sosial, di mana kelas dominan, seperti Pak Lebe, memanfaatkan posisi kaya dan berkuasa untuk menindas kelas bawah yang tidak memiliki akses terhadap kekayaan atau kekuasaan. Struktur sosial hierarkis memungkinkan kelas dominan mempertahankan dominasi dan mengeksploitasi kelas bawah. Hukum yang dipengaruhi oleh kekuasaan politik dalam sistem otoriter berkontribusi pada ketidakadilan ini, sebagaimana disebutkan oleh Mahfud MD dalam Wicaksono (2024), sehingga hukum formal sulit menyentuh individu seperti Pak Lebe.

4. Adegan 17 (Menit 21:29 – 22:49)



Gambar 8. Paman Gembul Menyewa Ajo Membunuh Si Macan



Gambar 9. Ajo Akan Dapat Duit Bila Menghabisi Si Macan

Denotasi	Konotasi	Mitos
Di tempat Paman Gembul Ajo menunjukkan minat untuk membunuh si Macan. Tempat yang luas, banyak perabotan kayu, dan pepohonan.	Menunjukkan relasi kuasa atas Paman Gembul terhadap orang yang tidak diinginkannya, dan menggunakan kekerasan sebagai cara mengatasi orang yang Paman Gembul anggap sebagai masalah.	Adanya sistem otoriter yang tidak menghendaki persaingan.

Tabel 4. Analisis 3 Tanda Barthes Pada Adegan Ketujuh Belas

Sistem politik otoriter menolak pluralisme politik dan menekankan kontrol penuh oleh penguasa, dengan kekuasaan terpusat pada individu, kelompok, atau partai tertentu. Partai-partai oposisi dilemahkan melalui pembatasan hukum, kooptasi, atau pembubaran (Said, 2016; Rumyati, 2023). Pemerintah otoriter menggunakan represi, kekerasan, dan intimidasi untuk membungkam kritik, termasuk penculikan, penahanan tanpa proses hukum, atau pembunuhan terhadap aktivis, jurnalis, dan intelektual oposisi. Pemilu tetap dilakukan tetapi sering dimanipulasi untuk memastikan kemenangan rezim, seperti kasus Orde Baru di mana Golkar selalu menang berkat dukungan aparat negara dan pembatasan terhadap oposisi (Rumyati, 2023).

Dalam film Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, Paman Gembul diasosiasikan dengan Presiden Soeharto yang memiliki kontrol penuh, dengan kemeja kuning sebagai representasi Golkar. Pada masa Orde Baru, Golkar mendominasi politik dengan dukungan penuh pemerintah dan militer (Rumyati, 2023). Partai-partai yang tidak sejalan dengan pemerintah sering dibubarkan atau ditekan, menciptakan persaingan politik yang tidak dinamis. Dominasi ini memastikan kelangsungan kekuasaan rezim, memperkuat karakteristik otoritarianisme, pembatasan kebebasan politik, dan pengawasan ketat terhadap oposisi (Rumyati, 2023). Era Orde Baru menunjukkan bagaimana sistem otoriter memanipulasi pemilu sebagai alat legitimasi dan menggunakan represi untuk melanggengkan kekuasaan.

5. Adegan 24 (Menit 34:04 – 34:45)



Gambar 10. Di Rumah Oma Iteung, Ajo Dan Iteung Menyiapkan Pernikahan



Gambar 11. Iteung Menyarankan Ajo Untuk Menolak Tawaran Membunuh

Denotasi	Konotasi	Mitos
Ajo dan Iteung sedang mengukur pakaian untuk pernikahan mereka di depan rumah Oma Iteung. Ajo dan Iteung juga membicarakan tawaran Paman Gembul untuk Ajo membunuh si Macan.	Di saat Ajo dan Iteung berada di ruang privat, namun Paman Gembul (digambarkan sebagai Pemerintah) masih saja bisa masuk untuk membayangi dan mengganggu mereka meski tidak secara langsung.	Dalam sistem otoriter, pengawasan dan campur tangan pemerintah sampai pada ranah privat masyarakat.

Tabel 5. Analisis 3 Tanda Barthes Pada Adegan Kedua Puluh Empat

Ruang privasi meliputi hak individu untuk menjaga informasi pribadi, ruang aktivitas tanpa gangguan, komunikasi tanpa penyadapan, serta hubungan sosial dari paparan publik. Namun, pada masa Orde Baru di Indonesia, ruang privasi sering dilanggar melalui pengawasan intensif oleh negara atas nama keamanan dan stabilitas politik. Lembaga seperti Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) dan Bakorstanas (Badan Koordinasi Stabilitas Nasional) memantau masyarakat dengan penyadapan telepon, pemantauan surat menyurat, serta infiltrasi organisasi (Southwood & Flanagan, 2013). Alasan keamanan negara digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat, mengawasi aktivitas masyarakat, serta menyensor informasi yang dianggap mengancam kekuasaan pemerintah.

Pengawasan ini bertujuan memperkuat kendali Orde Baru dan melindungi keluarga serta orang-orang dekat rezim. Individu yang dinilai membahayakan kekuasaan sering diintimidasi atau dihukum. Hal ini tercermin dalam Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, di mana adegan Ajo dan Iteung yang sedang mempersiapkan pernikahan mereka memperlihatkan ruang pribadi yang dimasuki oleh Paman Gembul, simbol Presiden Soeharto. Adegan ini menggambarkan bagaimana kekuasaan Orde Baru menyelinap ke dalam ruang pribadi masyarakat secara tidak disadari, mencerminkan kontrol dan pengawasan ketat rezim otoriter atas kebebasan individu.

6. Adegan 31 (Menit 40:18 − 41:15)



Gambar 12. Ibu PKK Sedang Melakukan Sensus



Gambar 13. Sensus Dilakukan Di Depan Rumah Oma Iteung

Denotasi	Konotasi	Mitos
Ibu PKK (Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga) sedang melakukan sensus penduduk. Ibu PKK bilang soal KB/Pengendalian Kelahiran masih dibebankan kepada perempuan.	Pemerintah Orde Baru menekan kelahiran dengan cara membebankan pada pihak perempuan daripada laki-laki, menyebabkan ketimpangan peran dan domestifikasi perempuan.	Orde Baru dengan ideologi Ibuisme Negara melalui PKK dan Organisasi keperempuanan lain bertujuan mengendalikan pikiran dan peran perempuan sesuai dengan kepentingan pemerintah.

Tabel 6. Analisis 3 Tanda Barthes Pada Adegan Ketiga Puluh Satu

Pada 1991, Indonesia di bawah Presiden Soeharto menggunakan Program KB sebagai upaya pembangunan ekonomi melalui pengendalian populasi (Adawiyah, 2019). Program ini dijalankan oleh BKKBN dengan dukungan aparat tingkat daerah, dan alat kontrasepsi lebih banyak disediakan untuk perempuan dibanding laki-laki, seperti pil, IUD, suntik, dan tubektomi. Ketimpangan partisipasi gender terjadi karena fokus utama program pada perempuan, yang sering menghadapi efek samping fisik dan psikis akibat kontrasepsi (Adawiyah, 2019). Hal ini dipengaruhi ideologi Ibuisme Negara Orde Baru yang menempatkan perempuan sebagai istri dan ibu yang bertanggung jawab melahirkan dan membesarkan generasi penerus bangsa (Rahyu & Kencana, 2019).

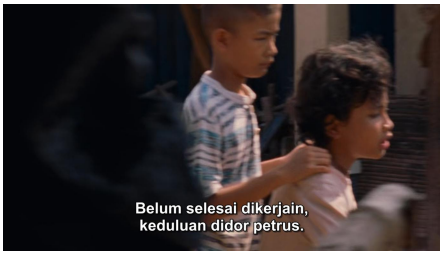
Peran ini melanggengkan subordinasi perempuan di bawah sistem patriarki, di mana laki-laki memiliki kekuasaan lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga, termasuk soal reproduksi (Adawiyah, 2019). Pemerintah Orde Baru memperkuat ketimpangan gender ini melalui kebijakan seperti undang-undang yang menetapkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan kontrasepsi hanya tersedia untuk perempuan dengan izin suami (Robinson, 2024). Ideologi familis Orde Baru menampilkan laki-laki sebagai kepala keluarga dengan kontrol penuh atas istri dan anak, memperkuat struktur patriarki yang kaku (Robinson, 2024).

Dalam acara-acara publik seperti upacara kemerdekaan atau hari ibu, perempuan ditampilkan dalam peran domestik sesuai ideologi negara, untuk mempertahankan tatanan sosial yang mapan (status quo) (Robinson, 2024). Struktur sosial ini menghilangkan kontrol perempuan atas tubuh dan keputusan reproduksi mereka, yang seharusnya menjadi hak asasi individu, sekaligus mempertegas kebijakan Orde Baru dalam melanggengkan ketidakadilan gender secara sistematis (Adawiyah, 2019).

7. Adegan 36 (Menit 47:30 – 47:43)



Gambar 13. Ajo Kecil dibonceng Tokek Kecil



Gambar 14. Ajo Kecil dan Tokek Kecil Membicarakan Petrus

Denotasi	Konotasi	Mitos
Ajo kecil dan Tokek kecil sedang berboncengan naik sepeda angin dan mereka membicarakan kejadian Petrus (penembakan misterius)	Petrus adalah kejadian pengadilan jalanan ala Orde Baru untuk menumpas preman atau kriminal yang tidak bisa ditertibkan (dimanfaatkan) oleh Orde Baru	Dengan alasan keamanan, pemerintah otoriter Orde Baru menggunakan cara militer secara keras kepada kriminal, preman, atau bahkan orang biasa yang sial karena mereka memiliki tato.

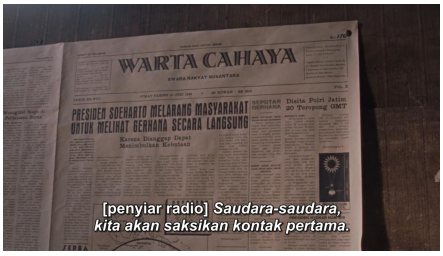
Tabel 7. Analisis 3 Tanda Barthes Pada Adegan Ketiga Puluh Enam

Fenomena penembakan misterius (Petrus) berlangsung antara 1983-1985 di berbagai kota besar Indonesia, bermula dari geng preman yang diorganisir Orde Baru melalui militer sebagai alat stabilitas rezim. Namun, kekacauan akibat peran preman yang tak terkendali mendorong pemerintah melakukan pembersihan brutal (Wilson, 2018). Operasi ini, dipimpin LB Moerdani di bawah Kopkamtib, menargetkan residivis, pemuda bertato, dan anggota geng dengan eksekusi tanpa proses hukum (Wilson, 2018). Jasad korban sengaja ditinggalkan di tempat umum untuk menebar teror, meski pemerintah menyebutnya sebagai konflik antar geng kriminal (Wilson, 2018).

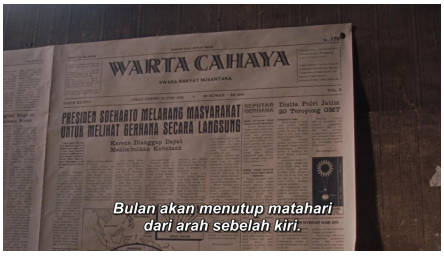
Tato dijadikan tanda identifikasi korban karena dianggap simbol kriminalitas. Pemerintah mengabaikan supremasi hukum dan menggunakan kekerasan terorganisir untuk menjaga citra rezim, memanipulasi narasi publik demi membenarkan tindakan represif. Operasi ini menunjukkan pola khas otoritarianisme Orde Baru, di mana kekerasan digunakan sebagai alat kontrol sosial dan politik. Sebanyak 5.000-10.000 korban diperkirakan tewas, dengan konsentrasi di Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jakarta (Wilson, 2018).

Ketidakmampuan sistem pengamanan seperti Siskamling dan Koopsus militer dalam mengatasi premanisme membuat Orde Baru mengandalkan pendekatan militer yang keras. Media menyebut "penembakan misterius" karena pemerintah enggan mengakui keterlibatan militer secara langsung. Narasi ini digunakan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dan menyembunyikan pelanggaran hak asasi manusia sambil menjaga kontrol penuh atas masyarakat. Fenomena Petrus mencerminkan penggunaan kekerasan, manipulasi narasi, dan teror publik untuk menanamkan rasa takut sehingga masyarakat tunduk terhadap rezim (Wilson, 2018).

8. Adegan 36 (Menit 47:48 – 47:53)



Gambar 15. Tampilan Koran Berita Tentang Gerhana Matahari 1983



Gambar 16. Tampilan Koran Berita Tentang Gerhana Matahari 1983

Denotasi	Konotasi	Mitos
Presiden Suharto melarang masyarakat untuk melihat gerhana secara langsung, karena dianggap dapat menimbulkan kebutaan. Disita Polri Jatim 20 Teropong GMT (Gerhana Matahari Total)	Tindakan pemerintah yang berlebihan dalam menyikapi fenomena gerhana.	Pers pada masa Orde Baru tidak memiliki kebebasan untuk menjalankan fungsi kontrol sosial yang kritis terhadap pemerintah. Pemerintah otoriter Orde Baru mengontrol ketat media melalui berbagai regulasi dan ancaman pembredelan terhadap media yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah

Tabel 8. Analisis 3 Tanda Barthes Pada Adegan Ketiga Puluh Enam

Pada masa Orde Baru, kontrol ketat terhadap pers diterapkan demi stabilitas nasional, dimulai pasca-peristiwa 1965. Pers diarahkan untuk mendukung ideologi Pancasila versi Orde Baru, mengakibatkan pelanggaran kebebasan pers (Ariwianto, 2023). Pemerintah menggunakan sistem perizinan ketat, seperti Surat Tanda Terdaftar (STT), Surat Izin Terbit (SIT), dan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), sebagai alat kontrol untuk menyaring media kritis (Ruswandi, 2004; Ariwianto, 2023). Empat tahapan kontrol pers melibatkan undang-undang perizinan (UU No.4/1967 dan UU No.21/1982), pembredelan media, penerapan sensor, dan manipulasi narasi publik (Lesmana, 2005; Ariwianto, 2023).

Pers pada era ini tunduk sepenuhnya pada kepentingan penguasa, di bawah organisasi seperti Dewan Pers yang melibatkan pemerintah. Konsep "pers pembangunan" digunakan untuk mendoktrin "kebebasan bertanggung jawab," namun kenyataannya memperkuat propaganda rezim (Hill, 2011; Ariwianto, 2023). Dalam insiden Gerhana Matahari Total 1983, larangan menyaksikan langsung fenomena ini menunjukkan bagaimana pemerintah memanfaatkan media untuk menanamkan ketakutan dan memonopoli informasi. Aparat melarang kerumunan warga dan menyita alat pengamatan, meski kebijakan tersebut dikritik sebagai tidak ilmiah (Kurniawan, 2016). Media massa, seperti TVRI, menjadi alat propaganda rezim, berfungsi untuk melanggengkan kekuasaan ketimbang menjadi pengawas independen (Kurniawan, 2016).

Situasi ini mencerminkan ciri khas rezim otoriter, di mana pers dimanipulasi untuk mengontrol opini publik dengan mengabaikan kebebasan informasi dan supremasi hukum (Ariwianto, 2023).

9. Adegan 70 (Menit 01:21:19 – 01:22:21)



Gambar 17. Iteung Dijemput Paman Gembul



Gambar 18. Iteung Dan Paman Gembul Berbicara

Denotasi	Konotasi	Mitos
Penggunaan bahasa baku "Aku, Kau, Saya" pada film.	Penggunaan bahasa ini berdasar Keppres No. 55 Tahun 1972 Tentang Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Dan berdasar Badan Sensor Film (BSF) tentang Kode Etik Produksi Film Nasional tahun 1981. Dua dasar di atas memiliki inti yakni film Indonesia harus menjadi sarana untuk membina bangsa serta mendukung peran kultural-edukatif, dan pembangunan nasional.	Penggunaan huruf, kata dalam kalimat lisan/tertulis berdasar melalui EYD dan Kode Etik Produksi Film Nasional tahun 1981, yang dilakukan pemerintah otoriter Orde Baru, bertujuan sebagai alat politik untuk mengendalikan masyarakat. Strategi ini memutus hubungan generasi muda dengan sejarah mereka, terutama era Orde Lama, dengan menciptakan kesulitan dalam memahami karya-karya yang ditulis sebelum tahun 1972. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatur bahasa, karena bahasa dianggap sebagai bentuk tindakan politik.

Tabel 9. Analisis 3 Tanda Barthes Pada Adegan Ketujuh Puluh

Dialog Paman Gembul kepada Iteung dalam adegan 70 mencerminkan dominasi eksekutif pada era Orde Baru. Ketika kekuasaan terpusat pada Presiden, sedangkan legislatif dan yudikatif hanya berfungsi sebagai pelengkap (Budiardjo, 2008). Hal ini menunjukkan bagaimana hukum diperlakukan sesuai keinginan rezim. Selain itu, penggunaan bahasa baku seperti "Aku, Kau, Saya" merefleksikan kendali pemerintah Orde Baru terhadap penggunaan bahasa melalui EYD (Ejaan Yang Disempurnakan), yang diberlakukan sejak 1972 untuk mengontrol narasi budaya dan menekan kreativitas generasi muda (Wibisono, 2020). Benedict Anderson mengkritik bahwa EYD menghapus kesinambungan sejarah, memisahkan era sebelumnya dengan Orde Baru, sehingga menciptakan penghapusan sejarah yang sistematis (Wibisono, 2020).

Perubahan ejaan Suwandi ke EYD membatasi akses generasi muda terhadap penerbitan era Sukarno, Revolusi, dan kolonial, membuat buku dengan ejaan lama terkesan sulit dipahami. Akibatnya, sejarah pra-Orde Baru tergeser oleh narasi rezim yang dominan. Gerakan antikolonial melawan Belanda hampir hilang dari ingatan publik, sementara Revolusi Kemerdekaan direduksi

menjadi Perang Kemerdekaan dengan penekanan pada peran militer. Ini mencerminkan upaya sistematis rezim Orde Baru untuk mengontrol narasi sejarah dan mempertahankan dominasi ideologi mereka (Wibisono, 2020).

Anderson juga menyoroti penggunaan bahasa sebagai sarana kontrol politik. Kebijakan EYD memastikan bahwa bahasa, baik di media maupun perfilman, selaras dengan agenda pemerintah. Misalnya, melalui film nasional, pemerintah menyebarkan propaganda yang mendukung stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi dengan menghindari tema-tema kritis. EYD digunakan untuk menghapus jejak sejarah tertentu, mengarahkan opini publik, dan membatasi kebebasan berekspresi (Utomo, 2018). Langkah ini menunjukkan ciri khas rezim otoriter yang memanfaatkan rekayasa bahasa sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan.

KESIMPULAN

Film "Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas" karya Edwin merefleksikan berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan politik masa Orde Baru yang otoriter melalui analisis semiotika Roland Barthes. Film ini secara efektif merepresentasikan berbagai aspek rezim otoriter Orde Baru secara simbolik melalui narasi visual dan suara. Film ini mengungkap tanda-tanda yang mewakili representasi pemerintah Orde Baru dalam 9 adegan utama :

1. Ideologi Negara yang Dominan: Orde Baru memaksakan ideologi seperti Dwi Fungsi ABRI dan Ibuisme Negara untuk mengontrol masyarakat. Contohnya, pada adegan 3, pemerintah membatasi Pancasila untuk mendukung kekuasaan otoriter dan memperkuat ketimpangan gender.
2. Diskriminasi dan Kekerasan Gender: Kebijakan Orde Baru membatasi peran perempuan di ruang publik. Pada adegan 5 dan 31, perempuan digambarkan lebih berat dalam tanggung jawab keluarga berencana dibanding laki-laki.
3. Kekuasaan Terpusat: Pada adegan 7, lemahnya penegakan hukum memaksa Ajo menegakkan keadilan sendiri terhadap Pak Lebe, yang menyalahgunakan kekuasaan.
4. Penggunaan Preman oleh Negara: Pada adegan 17, preman digunakan untuk merepresi lawan politik atau masyarakat.
5. Pemerintah Merasuk ke Ruang Privat: Pada adegan 24, ruang pribadi Ajo dan Iteung terganggu oleh kontrol pemerintah, termasuk dampak pelecehan seksual oleh tentara.
6. Kekerasan Militer: Pada adegan 36, penembakan misterius (Petrus) oleh militer digunakan untuk menyingkirkan preman yang tidak patuh.
7. Pembatasan Pers: Kebebasan pers dibatasi dan digunakan untuk propaganda pemerintah, seperti terlihat dalam adegan 36 saat gerhana matahari total 1983.
8. Bahasa sebagai Alat Kontrol Sosial: Pada adegan 70, EYD digunakan untuk menghapus jejak sejarah Orde Lama, membatasi akses generasi muda terhadap informasi pra-Orde Baru.

Film ini menjadi refleksi kritik terhadap rezim Orde Baru yang menggunakan berbagai alat untuk mengontrol masyarakat dan melanggengkan kekuasaan.

DAFTAR REFERENSI

Adawiyah, R. (2019). Kekerasan Dalam Implementasi Keluarga Berencana (KB) Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Al-'Adl*, *12*(1), 45–63. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v12i1.1382

Alkhajar, S., Nada, E., Yudiningrum, F. R., & Sofyan, A. (2013). Film Sebagai Propaganda di Indonesia. *Forum Ilmu Sosial*, *40*(2), 189–200.

https://doi.org/https://doi.org/10.15294/fis.v40i2.5356

Aniqurrohmah, S. F. L. (2023). Kesetaraan Gender Dan Nilai Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, *1*(2), 50–56. https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i2.170

Ariwianto, E. (2023). Kebebasan Pers Serta Kritik Masyarakat Dalam Masa Pemerintahan Orde Baru. *Jurnal Lani : Kajian Ilmu Sejarah Dan Budaya*, *4*(2), 107–110. https://doi.org/https://doi.org/10.30598/Lanivol4iss2page113-116

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (1st ed., Vol. 11, Issue 1). PT Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, B. (2020). *POST QUALITATIVE SOCIAL RESEARCH METHODS Kuantitatif-Kualitatif-Mix Methods Positivism-Postpositivism-Phenomenology-Postmodern Filsafat, Paradigma, Teori, Metode dan Laporan* (1st ed.). PRENADAMEDIA GROUP KENCANA.

Dewabrata, W. (2021). *Film "Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas" Menangi Penghargaan Golden Leopard*. Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/08/15/film-seperti-dendam-rindu-harus-dibayar-tuntas-menangi-penghargaan-bergengsi-eropa-golden-leopard

Dewi, K. H. (2007). Demokratisasi dan Dekonstruksi Ideologi Gender Orde Baru. *Jurnal Penelitian Politik*, *4*(1), 59–68.

Farchan, Y. (2022). Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru. *Jurnal Adhikari*, *1*(3), 152–161. https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.41

Ginanjar, P. A. (2022). *Boyong 5 Piala Citra, Ini Alasan Kenapa Film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas Wajib Ditonton*. Hypeabis.Id. https://hypeabis.id/read/18804/boyong-5-piala-citra-ini-alasan-kenapa-film-seperti-dendam-rindu-harus-dibayar-tuntas-wajib-ditonton

Honna, J. (2019). Military Ideology in Response To Democratic Pressure During the Late Suharto Era: Political and Institutional Contexts. *Violence and the State in Suharto's Indonesia*, *67*(67), 54–89. https://doi.org/10.7591/9781501719042-004

Kriyantono, R. (2006). *TEKNIK PRAKTIS RISET KOMUNIKASI KUANTITATIF DAN KUALITATIF Disertai Contoh Praktis Skripsi, Tesis, dan Disertasi Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (2nd ed.). Prenadamedia Group Divisi Kencana.

Kurniawan, B. (2016). *Gerhana Matahari Total 1983, Fenomena Alam yang Istimewa Namun Dianggap Bahaya*. Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-3123870/gerhana-matahari-total-1983-fenomena-alam-yang-istimewa-namun-dianggap-bahaya

Legge, J. D., McDivitt, J. F., Leinbach, T. R., Mohamad, G. S., Wolters, O. W., & Adam, A. W. (2024). Indonesia from the coup to the end of the New Order. In *Britannica* (9 Desember). Britannica. https://www.britannica.com/place/Indonesia/Political-developments

Mangunhardjana, A. (2007). *Isme-Isme dalam Etika: A sampai Z* (8th ed.). Penerbit Kanisius.

Nur, D. M. (2023). *PENGKARYAAN FILM FIKSI "DARAH TERAKHIR CLAURA" BERGENRE DRAMA THRILLER DALAM BIDANG DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY (DOP)* [Universitas Pasundan]. http://repository.unpas.ac.id/63000/

Rahyu, K. D., & Kencana, N. (2019). Ideologi State Ibuism Pada Gerakan PKK Di Desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Universitas Indo Global Mandiri*, *04*(3), 134–139. https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jpg.v4i3.773

Robinson, K. (2024). *Women's Rights in Indonesia*. Europeanbusinessreview.

https://www.europeanbusinessreview.com/womens-rights-in-indonesia/?mc_cid=51a96a8409&mc_eid=9dd26ab97a

Roida, A. (2018). *RESPON GERAKAN PEREMPUAN DI YOGYAKARTA TERHADAP ISU-ISU NASIONAL PADA MASA ORDE BARU (1980-1998)* [UIN Sunan Kalijaga Yogyakarya]. http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33110

Rumyati. (2023). EVOLUSI SISTEM PEMILU MASA ORDE BARU (1966-1998). *Kala Manca: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, *11*(1), 23–30. https://doi.org/https://doi.org/10.69744/kamaca.v11i1.203

Santosa, L. W. (2022). *Para pemenang Piala Maya 10, "Yuni" borong 7 penghargaan*. Antaranews.Com. https://www.antaranews.com/berita/2785741/para-pemenang-piala-maya-10-yuni-borong-7-penghargaan

Sobur, A. (2018). *Semiotika Komunikasi* (7th ed.). PT Remaja Rosdakarya.

Soumokil, S. L. (2013). REPRESENTASI VIGILANTE DALAM ANIME " DEATH NOTE ." *Jurnal E-Komunikasi Universitas Kristen Petra Surabaya*, *1*(3), 11–23. https://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/917

Southwood, J., & Flanagan, P. (2013). *Teror Orde baru Penyelewengan Hukum Dan Propaganda 1965-1981* (Tim Komunitas Bambu & D. Lubis (eds.); Pertama). Komunitas Bambu.

Tricana, D. W. (2013). MEDIA MASSA DAN RUANG PUBLIK (Public sphere), SEBUAH RUANG YANG HILANG. *Aristo*, *1*(1), 8. https://doi.org/10.24269/ars.v1i1.1538

Utami, S. F. (2017). Manifestasi Sistem Pemerintahan Otoriter dalam Novel Faraj Karya Radwa Ashour dan Novel Pulang Karya Leila S. Chudori. *Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*, *9*(1), 660–673. https://doi.org/https://doi.org/10.15548/diwan.v9i17.172

Utomo, Y. S. (2018). *KEBIJAKAN PERFILMAN INDONESIA PADA MASA ORDE BARU (1967-1980)* [Universitas Negeri Jakarta]. http://repository.unj.ac.id/id/eprint/31761

Wahyudi, A. (2015). Ideologi Pancasila: Doktrin Yang Komprehensif Atau Konsepsi Politis? *Jurnal Filsafat*, *39*(1), 94–115. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jf.31325

Wibisono, J. (2020). *Maksud Politik Jahat, Benedict Anderson tentang bahasa dan kuasa* (M. Iqbal (ed.); 1st ed.). Tanda Baca.

Wicaksono, M. W. D. (2024). Gerakan Studi Hukum Kritis di Indonesia. *Jurnal Bevinding Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta*, *02*(02), 56–60. https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1128

Wilson, I. D. (2018). *Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru* (M. J. Suryana (ed.); Ketiga). Marjin Kiri.